



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALOPO
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. JUDAS AMIR
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 170471

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 10.615.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 461 m²/400 m² di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/1811 m² di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 3.675.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m²/900 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 5.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 260.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOBIL, MITSUBISI PAJERO Tahun 2009, LAINNYA Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 113.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 329.758.383

F. HARTA LAINNYA

Rp. 205.000.000

Sub Total

Rp. 11.522.758.383

III. HUTANG

Rp. 740.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.782.758.383



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.